

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di seluruh dunia saat ini, etnis minoritas bergerak mengikuti garis etnis nasionalis, menuntut kekuasaan dan pengakuan sebagai sebuah kelompok dari negara bagian tempat mereka tinggal. Dalam beberapa kasus, mereka menuntut negara sendiri, berdasarkan status kelompok mereka sebagai bangsa sendiri. Para penantang negara tempat mereka tinggal ini sering kali ditindas secara brutal, namun mobilisasi sering berlanjut dalam menghadapi penindasan ini seperti halnya yang dialami bangsa Kurdi.

Bangsa Kurdi merupakan bangsa besar yang tidak memiliki wilayah teritorial. Dahulu bangsa Kurdi berkedudukan semi otonom di bawah kekuasaan berbagai kerajaan, termasuk dari abad ke-16 kerajaan Persia dan Kerajaan Ottoman telah memberikan hak otonom bagi bangsa Kurdi dalam rangka memelihara perdamaian di perbatasan terbuka mereka (Yildiz, 2017).

Peluang kurdi untuk mendirikan negara sendiri muncul di masa keruntuhan kerajaan Ottoman pada akhir perang dunia pertama. Ketika itu President Amerika Serikat Woodrow Wilson memberikan pernyataan bahwa minoritas non-Turki dari kerajaan Ottoman dijamin secara mutlak tanpa ada gangguan peluang untuk mengembangkan otonominya (Yildiz, 2017).

Disusul pada tahun 1920 telah ditandatangani perjanjian Sevres "*Treaty of Sevres*" (Mc Dowall, 2007) antara negara-negara sekutu (Amerika Serikat, Inggris dan Prancis) dengan Pemerintah Kerajaan Ottoman yang mempertimbangkan sebuah negara Kurdi yang independen. Akan tetapi perjanjian tersebut tidak terealisasi karena adanya tentangan dari pihak negara republik Turki baru di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal sehingga ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut tidak ia akui dan berdampak perang. Kemudian terjadilah kesepakatan baru yang ditengahi oleh Liga Bangsa-Bangsa dan Inggris dalam Perjanjian Lausanne "*Treaty of Lausanne*" 1923 (Mahmod, 2016). Dalam perjanjian tersebut posisi Kurdi dengan segala kepentingannya tidak menjadi *concern* di dalamnya, sehingga pada wilayah yang tunduk pada perjanjian Sevres dikembalikan kepada kedaulatan Turki dan sisanya dibagi antara Iran dan negara baru Irak (Yildiz, 2017).

Meskipun orang-orang Kurdi hidup di wilayah republik Armenia dan Azarbaijan, di Syiria dan juga Khurasan Iran bagian selatan, atau kota-kota di Istanbul, Ankara, Tabriz dan Tehran, namun mayoritas orang-orang Kurdi masih menempati wilayah pegunungan dan dataran tinggi Zagros yang terbagi dalam wilayah perbatasan Turki, Irak, dan Iran. Jumlah populasinya sekitar 23% dari populasi Turki, 23% dari Irak, dan 10% dari Iran ((Mc Dowall, 2007).

Suku Kurdi yang termasuk ke dalam wilayah kedaulatan Turki merasa disudutkan dengan kebijakan pembatasan-pembatasan pemerintah yang telah mengaburkan keberadaan suku Kurdi di Turki bahkan mereka disebut pemerintah sebagai "orang Turki Pegunungan". Atas dasar itulah salah satu tokoh

cendekiawan Kurdi bernama Abdullah Ocalan pada tahun 1978 berinisiatif mendirikan *Partiya Karkerên Kurdistanê* (PKK) yang mengajak orang-orang Kurdi lainnya untuk menuntut supaya mendirikan sebuah negara Kurdi di Turki. Gerakan partai PKK diliputi dengan konflik kekerasan dengan pemerintah Turki hingga menewaskan 40.000 dan ribuan lainnya kehilangan tempat tinggal (BBC News, 2019).

Kemudian di tahun 1990 PKK merubah tuntutannya pada otonomi politik dan budaya. Terjadi gencatan senjata di tahun 2013, namun gagal di tahun 2015 setelah terjadinya insiden bom bunuh diri yang telah menewaskan 33 aktivis Kurdi di Suruc yang berbatasan dengan Syiria. Pada saat itu pemerintah Turki menganggap organisasi *Islamic State of Iraq and Syiria* (ISIS) merupakan aktor yang harus bertanggung jawab terhadap insiden tersebut, namun partai PKK menganggap ada pembiaran dari pemerintah Turki, sehingga menimbulkan peperangan antara pemerintah Turki dan partai PKK yang dinamai oleh pemerintah Turki sebagai “perang terpadu melawan terror” karena lawan yang diperangi pemerintah Turki adalah PKK dan ISIS (BBC News, 2019). Hingga saat ini PKK dianggap pemerintah Turki sebagai kelompok teroris.

Tidak berbeda jauh dengan keadaan Kurdi di Turki, Kurdi di Iran pun menghadapi masalah yang sama meskipun Kurdi Iran sempat mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai negara republik Mahabbad dengan perlindungan dari Uni Soviet pada 22 Januari 1946 namun hanya berumur pendek setelah direbut kembali oleh pemerintah Shah Iran. Harapan Kurdi Iran akan terbentuknya pemerintahan yang demokratis dan otonom setelah andilnya bersama oposisi

dalam revolusi menggulingkan Shah Iran tahun 1979 berujung pada keterasingan politik yang disebabkan sikap kontradiktif dari pemerintahan yang baru (Nasrullah, 2020).

Lain halnya dengan suku Kurdi di Syria, 7-10% dari populasi penduduk Syria merupakan dari suku Kurdi. Bertempat tinggal di Damaskus, Aleppo, Kobane, Afrin, dan Qamishli, Kurdi Syria tidak diberi hak-hak sipil dan tidak diakui kewarganegaraannya oleh pemerintah Syria sejak tahun 1960-an. Kebijakan Arabisasi atau Dekurdisasi pemerintah Syria telah menyulutkan api pemberontakan, hingga saat ini Kurdi Syria tergabung dalam koalisi AS dan oposisi dalam upaya menggulingkan rezim Assad (BBC News, 2019).

Suku Kurdi yang berada di Irak merupakan satu-satunya yang telah memperoleh hak otonomi pada tahun 2005 meskipun diwarnai dengan konflik panjang dengan Baghdad pada masa rezim Saddam Hussein yang dikenal otoriter. Penduduk Kurdi Irak menempati wilayah Dohuk, Arbil, Sulemaniah, dan Kirkuk yang masih menjadi permasalahan Kurdi dan Baghdad menimbang sumber cadangan minyak bumi yang besar di wilayah tersebut (Gunter, 2011).

Kurdi Iraq menyuarakan tuntutan dan aspirasinya lewat partai *Kurdish Democratic Party* (KDP) yang dipimpin Mustofa Barzani dan *Party Union of Kurdish* (PUK) yang dipimpin Jalal Talabani. Kemudian setelah itu dibentuklah *Kurdish Regional Government* (KRG) sebagai wadah pengambilan kebijakan antara partai KDP dan PUK di wilayah otonomi Kurdi. KRG dilengkapi dengan pasukan militer yang cukup kuat bernama Peshmerga yang mengamankan dan

memperjuangkan kepentingan Kurdi di Iraq hingga saat lengsernya pemerintahan Saddam Husein, terpilihlah Jalal Talabani menjadi presiden Iraq yang resmi dan Masoud Barzani sebagai presiden regional otonom wilayah Kurdi Iraq (KRG).

Dari latar belakang di atas ada yang menarik untuk kita soroti bahwa ditengah sulitnya suku Kurdi di Turki, Iran, dan Syiria dalam memperoleh pengakuan dan otonomi di negara mereka masing-masing. Suku Kurdi di Iraq meskipun diawali dengan peperangan panjang melawan pemerintahan pusat Iraq (Baghdad) yang sangat kuat dan otoriter dibawah kepemimpinan Saddam Hussein berhasil memperoleh hak otonominya dan dapat menunjukkan perannya di pemerintahan Iraq sebagai Presiden menggantikan Saddam Hussein.

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, muncul sebuah pertanyaan yang penulis ingin teliti “Bagaimana dinamika perjuangan suku Kurdi Irak dalam memperoleh status otonomi di wilayahnya”

#### **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis mengangkat penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan sejarah perjuangan suku Kurdi di Iraq
2. Menjelaskan dinamika perjuangan Kurdi Iraq sebelum dan sesudah era Saddam Hussein

3. Menganalisa transformasi tata kelola politik etnis Kurdi Iraq menjadi elit politik dalam pemerintahan Iraq

### **C. Kontribusi Penelitian**

Harapan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat seperti :

1. Menyajikan data ilmiah terkait sejarah perjuangan Kurdi di Iraq
2. Memunculkan pemahaman baru terkait dinamika Kurdi Iraq dalam memperjuangkan status otonominya dimasa Saddam Hussein dan pasca rezim Saddam Hussein.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Berikut beberapa karya penelitian yang berkaitan dengan suku kurdi guna memperkaya khasanan pengetahuan tentang perjuangan memperoleh hak otonomi:

*Pertama*, penelitian Sarah Demmrich dan Maya Arakon (2020) yang bertujuan untuk menganalisa bagaimana status identitas kesukuan dan agama para migran Kurdi yang berada di negara Jerman dengan penyesuaiannya pada norma dan nilai-nilai yang dianut masyarakat Jerman secara umum. Dalam penelitiannya, Demmrich dan Arakon juga menyandingkan dengan data dari sisi migran Turki yang berada di Jerman sebagai pembanding. Dan dari hasil analisisnya menunjukkan migran Kurdi lebih menunjukkan integrasinya atau penyesuaiannya terhadap nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat Jerman

daripada migran non-Kurdi sehingga membentuk identitas hybrid (Demmrich, Arakon, & Demmrich, 2020).

*Kedua*, penelitian Güneş Murat Tezcür dan Helin Yıldız (2019) yang membahas tentang kondisi perpolitikan Kurdi di Suriah pasca tahun 2011 dimana Partai Yekitia Demokrat (PYD) berhasil mengungguli partai Kurdi lainnya yang tengah mengalami kemunduran. Dalam penelitiannya Tezcür dan Yıldız berargument bahwa berdirinya PYD bukanlah sebagai kepanjangan tangan dari rezim kepemimpinan Assad, melainkan letak posisi PYD diperbatasan Suriah-Turki dan terjalinnya hubungan lintas batas PYD dengan PKK Kurdi Turki memberikan keuntungan bagi partai tersebut (Tezcür & Yıldız, 2021).

*Ketiga*, penelitian Sherko Kirmanj dan Aram Rafaat (2020) bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan motif negara Irak melakukan operasi Genosida Kurdi yang telah beroperasi pada September 1988. Menurut Sherko dan Aram motif negara Irak dalam operasi tersebut dapat diidentifikasi melalui dua dimensi, yakni dimensi keamanan dan dimensi identitas. Secara dimensi keamanan bertujuan untuk mengatasi kelompok pemberontak Kurdi, namun secara dimensi identitas bertujuan dalam rangka de-Kurdisifikasi provinsi Kirkuk untuk melakukan Arabisasi di wilayah Kurdistan Irak yang secara strategis memiliki potensi ekonomi dan politik (Kirmanj & Rafaat, 2020).

*Keempat*, penelitian Bahar dan Mari Toivanen (2017) yang menguji keterkaitan GRP (*Genocide Recognice Politic*) atau politik pengakuan peristiwa genosida yakni penghapusan etnis Kurdi Irak di masa pemerintahan Saddam Hussein tahun 1988 dengan upaya pemisahan diri, pembangunan bangsa dan peringatannya, serta perubahan penggerak social, politik, dan ekonomi dalam prosesnya. Selain itu Bahar dan Mari Toivanen juga menekankan pada internasionalisasi pengakuan Genosida melalui lobi diaspora dan biro perwakilan Pemerintah Daerah Kurdi di Iraq atau KRG (*Kurdistan Regional Government*) yang berada di Eropa. Hasilnya tidak secara eksplisit menunjukkan adanya keterkaitan dengan upaya pemisahan diri, namun klaim pengakuan genosida melalui biro KRG tersebut digunakan untuk melegitimasi aturan lokal dengan merujuk pada trauma kolektif sebagai korban. Sehingga traumatik atas tragedi *Anfal* di era Saddam Hussein menjadi komponen utama dalam pembangunan bangsa, dan tidak menutup kemungkinan digunakan untuk upaya pemisahan diri apabila keadaan politik di wilayah tersebut memungkinkan (Baser & Toivanen, 2017).

*Kelima*, penelitian Arda Bilgen (2017) menjelaskan Proyek Anatolia Tenggara (GAP) sebagai kebijakan modernisasi Turki dan upaya mewujudkan integrasi dan homogenisasi di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya di tingkat nasional telah menyinggung keberlangsungan suku Kurdi yang lama bermukim di wilayah tersebut. Bilgen dengan artikelnya bertujuan untuk menjelaskan bagaimana hubungan timbal balik antara Proyek Anatolia Tenggara (GAP) dengan masalah Kurdi dapat dimengerti dan diceritakan baik



secara tertulis maupun lisan sejak awal diinsiasikannya proyek tersebut ditahun 1970an. Dengan menguji 3 (tiga) narasi utama yang mengacu pada beberapa sumber data yang menjadikan proyek GAP berperan sebagai : (1) Plot “Anti Kurdi” yang strategis, (2) Penanggulangan Konflik, dan (3) Proyek netral dan non pengembangan politik, Bilgen menyimpulkan relatifitas dalam menilai GAP karena dapat memberikan gambaran yang berbeda tentang proyek dan menggambarkan bagaimana interpretasi dapat bervariasi tergantung pada posisi pembicara dan konteks dimana proyek dinilai (Bilgen & Bilgen, 2017).

*Keenam*, penelitian Hisyar Ozsoy menjelaskan atas dasar terbagi dalam batas-batas wilayah yang luas, Kurdi tidak terbentuk atas nama budaya, agama, ideology, dan kepentingan politik yang sama. Salah satu landasan penting yang menyatakan bahwa Kurdi sebagai identitas kolektif disebabkan oleh kebijakan asimilasi negara tempat mereka tinggal dan kekerasan yang telah mereka alami sehingga menimbulkan perlawanan terhadap kebijakan tersebut selama 2 (dua) abad terakhir. Upaya perlawanan tersebut menjadi sarana utama Kurdi demi eksistensi budaya, dan politik Kurdi di Timur Tengah. Dengan berlandaskan pendekatan *positivis* Ozsoy mendefinisikan Kurdi sebagai kelompok etnis yang memiliki perbedaan dengan batas-batas wilayah yang jelas, sehingga perjuangan Kurdi dan tuntutananya disetiap negara berbeda-beda (Ozsoy, 2013).

*Ketujuh*, penelitian Shwan Zulal (2012) yang membandingkan antara kemunduran pemerintahan Iraq pasca perang teluk dengan kondisi Kurdi Iraq

dimasa yang sama. Dalam artikelnya Zulal menyatakan bahwa minyak telah membuat Kurdi menemukan cara menggunakan sumber dayanya untuk pembangunan ekonomi, memastikan bahwa wilayah Kurdistan tetap stabil dan dapat memantapkan dirinya sebagai sebuah entitas yang memerintah sendiri dan berpengaruh (Zulal, 2012).

Berikut tabel yang menjelaskan secara ringkas mengenai beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penulisan tesis ini:

**Tabel I**

**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian	Variabel	Hasil
1	Sarah Demmrich dan Maya Arakon (2020) <i>“Kurdish, Turkish, German? Identificative integration of Kurds in Germany”</i>	Perbandingan Integrasi migran Kurdi dengan migran Turki di Jerman.	Migran Kurdi lebih menunjukkan integrasinya atau penyesuaiannya terhadap nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat Jerman daripada migran non-Kurdi sehingga membentuk identitas hybrid

2	<p>Güneş Murat Tezcür dan Helin Yıldız (2019)</p> <p><i>“Kurdish politics in post-2011 Syria : From fragmentation to hegemony”</i></p>	<p>Keberadaan partai PYD sebagai representasi Kurdi di Syiria.</p>	<p>Berdirinya PYD bukanlah sebagai kepanjangan tangan dari rezim kepemimpinan Assad, melainkan letak posisi PYD diperbatasan Suriah-Turki dan terjalinnya hubungan lintas batas PYD dengan PKK Kurdi Turki memberikan keuntungan bagi partai tersebut</p>
3	<p>Sherko Kirmanj dan Aram Rafaat (2020)</p> <p><i>“The Kurdish genocide in Iraq : the security-Anfal and Identity-Anfal”</i></p>	<p>Fenomena genosida Kurdi di Iraq dari sisi dimensi sekuritas dan identitas.</p>	<p>Operasi Anfal pemerintah Iraq e cara dimensi keamanan bertujuan untuk mengatasi kelompok pemberontak Kurdi, namun secara dimensi identitas bertujuan dalam rangka de-Kurdisifikasi provinsi Kirkuk untuk melakukan Arabisasi di</p>

			wilayah Kurdistan Irak yang secara strategis memiliki potensi ekonomi dan politik.
4	Bahar Baser dan Mari Toivanen (2017)  <i>“The politics of genocide recognition : Kurdish nation-building and commemoration in the post-Saddam era”</i>	Hubungan Politik Pengakuan Genosida Iraq di Era kepemimpinan Saddam Hussein dengan pembentukan nasionalisme Kurdi di Iraq.	Tidak secara eksplisit menunjukkan adanya keterkaitan dengan upaya pemisahan diri, namun klaim pengakuan genosida melalui biro KRG tersebut digunakan untuk melegitimasi aturan lokal dengan merujuk pada trauma kolektif sebagai korban. Sehingga traumatik atas tragedi <i>Anfal</i> di era Saddam Hussein menjadi komponen utama dalam pembangunan bangsa, dan tidak menutup kemungkinan digunakan

			<p>untuk upaya pemisahan diri apabila keadaan politik di wilayah tersebut memungkinkan.</p>
5	<p>Arda Bilgen (2017)</p> <p><i>“A project of destruction, peace, or techno-science? Untangling the relationship between the Southeastern Anatolia Project (GAP) and the Kurdish question in Turkey”</i></p>	<p>Hubungan agenda proyek pembangunan Pemerintah Turki GAP (Proyek Anatolia Tenggara) dengan permasalahan Kurdi.</p>	<p>Dengan menguji 3 (tiga) narasi utama yang mengacu pada beberapa sumber data yang menjadikan proyek GAP berperan sebagai : (1) Plot “Anti Kurdi” yang strategis, (2) Penanggulangan Konflik, dan (3) Proyek netral dan non pengembangan politik, Bilgen menyimpulkan relatifitas dalam menilai GAP karena dapat memberikan gambaran yang berbeda tentang proyek dan menggambarkan</p>

			<p>bagaimana interpretasi dapat bervariasi tergantung pada posisi pembicara dan konteks dimana proyek dinilai.</p>
6	<p>Hisyar Ozsoy (2013)</p> <p><i>“The Kurds’ ordeal with Turkey in a transforming Middle East”</i></p>	<p>Keberadaan Kurdi di Timur tengah</p>	<p>Terbagi dalam batas-batas wilayah yang luas, Kurdi tidak terbentuk atas nama budaya, agama, ideology, dan kepentingan politik yang sama.</p> <p>Dengan berlandaskan pendekatan <i>positivis</i> Ozsoy mendefinisikan Kurdi sebagai kelompok etnis yang memiliki perbedaan dengan batas-batas wilayah yang jelas, sehingga perjuangan Kurdi dan tuntutananya disetiap negara berbeda-beda.</p>

7	<i>Shwan Zulal (2012)</i>  “Survival Strategies and Diplomatic Tools: The Kurdistan Region’s Foreign Policy Outlook”	Strategi politik  luar negeri Kurdi	Minyak telah membuat  Kurdi menemukan cara menggunakan sumber dayanya untuk pembangunan ekonomi, memastikan bahwa wilayah Kurdistan tetap stabil dan dapat memantapkan dirinya sebagai sebuah entitas yang memerintah sendiri dan berpengaruh.
---	--	---	--

Dari daftar jurnal yang penulis dapatkan di atas kebanyakan penelitian mengungkapkan konflik yang berkepanjangan antara Baghdad dan Kurdi Iraq dan pencapaian hak otonomi bagi kurdi di Iraq. Dalam penelitian ini hendak mengangkat dinamika proses perundingan suku Kurdi Iraq dengan pemerintah Iraq (Baghdad) dalam merumuskan perjanjian damai serta analisa perubahan tata kelola politik suku Kurdi Iraq pasca runtuhnya rezim Saddam Hussein.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Untuk menganalisa kajian ini penulis menggunakan teori ripeness, Otonomi, dan Federasi sebagai kaca mata dalam melihat fenomena yang

dialami Kurdi Irak pada masa merdekanya Irak sebagai Negara hingga lengsernya Saddam Hussein.

Separatisme ditujukan pada tindakan seseorang atau sekelompok orang atau komunitas yang berada dalam satu kesatuan besar yang hendak memisahkan diri atau keluar dari komunitas atau kesatuan besar itu dengan maksud berdiri sendiri sebagai negara atau bangsa merdeka (I. Wayan Parthiana, SH., 2003).

Mendirikan sebuah negara yang merdeka dan mandiri yang dikaji dalam literature *international law* merupakan salah satu motivasi pemberontakan yang terjadi dalam suatu negara. Sedangkan motivasi yang lain ialah menggantikan pemerintahan lama dengan pemerintahan yang baru sesuai dengan keinginan pihak pemberontak, atau berintegrasi dengan negara lain, atau juga otonomi yang cakupannya lebih luas (I. Wayan Parthiana, SH., 2003).

Dalam buku karangan Henri E. Hale "*Separatism of States and Nations in Eurasia and the World*", akar permasalahan Separatisme berawal pada asumsi bahwa Separatisme Etnis sebagai konflik atau asumsi Separatisme Etnis sebagai Epifenomenal (Hale, 2008).

Separatisme Etnis sebagai konflik, yakni ketika perbedaan etnis terlihat sangat jelas dengan teritorinya dalam suatu wilayah, maka akan muncul kelompok yang atas dasar perbedaan tersebut cenderung berusaha untuk menguasai atau memisahkan teritorinya dari wilayah tersebut.



Separatisme Etnis sebagai Epifenomenal menyangkal bahwa perbedaan Etnis yang memunculkan motivasi pemisahan diri atau Separatisme, akan tetapi Separatisme justru biasanya muncul dari kepentingan ekonomi dan politik. Dari segi pertimbangan ekonomi, bagi wilayah atau daerah yang kaya akan sumber daya alam didalamnya lebih menunjukkan tindakan separatism-nya daripada wilayah yang miskin atau tidak memiliki sumber daya alam, karena mereka (wilayah kaya SDA) ingin terlepas dari ketidakadilan distribusi ekonomi atau persaingan etnis dalam lapangan pekerjaan (Hale, 2008).

Teori-teori Hubungan Internasional sangat mirip cara berpikirnya dengan kategori etnis sebagai epipenomenal dimana teori-teori hubungan internasional menyatakan bahwa perbedaan etnis bukan sebuah faktor yang mempengaruhi sebuah negara untuk berintegrasikan dengan negara-negara lainnya, karena kepentingan negara itu simple dan murni.

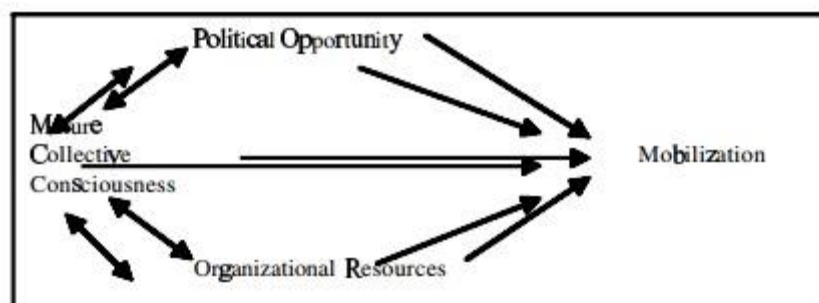
Carton J.H. Hayes memandang separatisme dari segi siklus historis merupakan fase dimana dalam hukum organisms "lahir-tumbuh-berkembang-runtuh" yang pasti akan dialami sebuah komunitas politik baik negara maupun kerajaan dimana mengalami masa berdirinya, berkembang hingga berjaya dan akhirnya mengalami kehancuran atau runtuh yang bisa disebabkan berbagai pergolakan politik atau gerakan separatisme (Suryo, 2003).

Berdirinya suatu negara atau kerajaan dapat ditelaah melalui dua sisi teori, sisi pertama teori konflik, dan teori konsensus. Berdasarkan teori konflik suatu negara atau kerajaan berdiri dengan melalui pemaksaan dan kekerasan, khususnya

bentuk ekspansi dan invasi yang telah terjadi cenderung berpotensi konflik dan separatism di masa berikutnya (Suryo, 2003).

Namun tidak dapat disimpulkan pula suatu negara atau kerajaan yang berdiri secara alami atau konsensus bebas dari upaya separatisme. Hal tersebut tergantung pada landasan konsensus yang telah disepakati antara pemerintah dan masyarakat atau penduduknya dengan situasi dan kondisi yang telah berjalan. (Suryo, 2003).

Munculnya pemberontakan etnopolitis karena adanya kekecewaan di antara kelompok etnis yang dimobilisasi dengan baik hingga melahirkan gerakan-gerakan kolektif sebagai upaya untuk menggambarkan fenomena konflik etnis dalam lingkup interaksi domestik dan internasional (Lyon & Uçarer, 2010).



Mobilisasi gerakan separatis lahir dari identitas yang diperteguh secara politis dengan sumber daya operasional dan peluang politik yang mendukung (Lyon & Uçarer, 2010).

Letak geografis yang mempertemukan belahan dunia timur dan barat menjadikan wilayah timur tengah sangat strategis dan sering terjadi konflik. Karl Haushoffer dan Mc Kinder menamakan wilayah tersebut sebagai “*heart-land*”

(wilayah jantung) sehingga menjadikan sumber konflik dalam Perang dunia I di Eropa yang berdampak pada wilayah timur tengah. Tahun demi tahun alasan konflikpun bergeser pada sumber daya alam yakni minyak karena tahun 1970 dunia bergantung pada pasokan minyak Timur Tengah guna mendukung paradigm pembangunan dengan industrialisasi di tiap negara didunia (Surwandono, 2013b).

Dalam buku berjudul *Escalation and Negotiation in International Conflicts*, I. William Zartman mengungkapkan bahwa bertemunya konflik yang meluas dengan negosiasi manakala pihak-pihak yang bertikai berada pada masa *mutually hurting stalemate* atau masa kebuntuan yang saling menyakiti. Masa itulah yang Zartman sebut masa kematangan (*ripeness theory*) (I. William Zartman and Guy Olivier, 2005).

Menurut Kreisberg dan Thorson (1991), orang biasanya tidak akan mau duduk untuk bernegosiasi sampai mereka mencapai titik kebuntuan di mana setiap orang tidak lagi meyakini untuk mendapatkan apa yang dia inginkan melalui upaya mendominasi atau memaksa (I. William Zartman and Guy Olivier, 2005) .

Perselisihan Kurdi Iraq dan Baghdad sendiri telah melalui masa kematangan dimana Kurdi Iraq dan Baghdad bertahun-tahun bergelut dalam konflik panjang yang meningkat dan memakan banyak korban hingga mendapatkan kecaman dan tekanan dari negara-negara internasional dan organisasi PBB hingga keduanya mengambil jalan negosiasi dan menghasilkan pemberian hak otonomi Kurdi.

Pemindahan kekuasaan pusat kepada daerah atau regional dalam bentuk pemerintahan regional yang mandiri atau otonomi dapat mengurangi tingkat frekuensi konflik. Kajian otonomi pun ada beberapa jenis seperti; pemerintahan otonomi, pemerintahan otonomi yang diperluas, pemerintahan otonomi khusus, dan pembentukan negara federal.

Berkaitan dengan perselisihan yang dialami Kurdi Iraq dan Baghdad, Afan Gaffar, Ryas Rasyid, dan Syaukani dalam karya bukunya “Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan” menyatakan bahwa desentralisasi kekuasaan ke pemerintah regional dapat memantapkan stabilitas politik dan kesatuan dengan memberikan peluang kepada masyarakat di wilayah tersebut untuk bisa andil secara langsung dalam pembuatan kebijakan (Surwandono, 2013).

Namun desentralisasi kekuasaan dalam bentuk pemerintahan otonomi belum bisa memfasilitasi kelompok kepentingan yang ingin memisahkan diri. Pemberian otonomi semata merupakan bentuk ketidakseriusan pemerintah pusat dalam merespon kepentingan regional yang sebelumnya telah terdiskriminasi dan tereksploitasi oleh pemerintah pusat sehingga pembentukan pemerintah otonomi hanya memberikan kekuasaan administratif bukan kekuasaan politik yang otonom.

Dibandingkan dengan desentralisasi yang diperluas atau pemerintah otonomi yang diperluas, Hoogerwert menyatakan bahwa pemerintahan otonomi yang diperluas merupakan bentuk pengakuan atau penyerahan kewenangan oleh badan-badan umum yang lebih tinggi kepada badan-badan umum yang lebih

rendah sehingga dapat mengambil keputusan pengaturan dan pemerintahan secara mandiri. Desentralisasi atau otonomi yang diperluas memungkinkan representasi yang lebih luas dari berbagai kelompok politik, etnis, keagamaan di dalam perencanaan pembangunan sehingga dapat memperluas kesamaan dalam mengalokasikan sumber daya dan investasi pemerintah (Surwandono, 2013).

Sedangkan pilihan politik yang lain dalam menyelesaikan masalah separatisme Kurdi Iraq yakni pembentukan pemerintah otonomi khusus yang mana memberikan kewenangan secara khusus dan berbeda dengan pemberian kewenangan di daerah lain. Sebagaimana Robert D. Congleton mengatakan bahwa asimetris desentralisasi atau pemberian otonomi yang berbeda merupakan instrument kebijakan untuk mengatasi dua problem fundamental di daerah yang dihadapi suatu negara. Pertama, permasalahan politis sebagai strategi kebijakan untuk mempertahankan *basic boundaries* unit politik suatu negara atau sebagai apresiasi atas keunikan budaya tertentu. Kedua, permasalahan teknokratik-manajerial merupakan keterbatasan kapasitas suatu wilayah dalam menjalankan fungsi dasar pemerintahan karena ketidakmampuan menyampaikan dan menyediakan pelayanan publik secara memadai dimana pendekatan asimetris memungkinkan pemerintah pusat dapat memaksimalkan rentang fungsi dan kekuasaannya (Surwandono, 2013).

Sedangkan opsi terakhir dalam menanggulangi separatism Kurdi Iraq yakni pembentukan pemerintahan federal. Berdasarkan studi yang dilakukan Ildus G. Ilishev, opsi ini digunakan sebagai alternatif untuk mengajak kelompok separatis untuk berunding dan menyelesaikan sengketa politik secara damai.

Konsep pemerintahan federal ini dianggap akan memberikan konsesi ekonomi dan politik yang luas kepada kelompok separatis dan disisi lain pemerintah pusat tetap dapat menjaga keutuhan wilayah maupun kedaulatan nasional (Surwandono, 2013).

Sedangkan menurut Michael M. Gunter federalisme merupakan bentuk pemerintahan yang mana kekuasaan terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah regional. Terdapat dua jenis sistem federal yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan Kurdi Iraq dan Baghdad: (1) *majoritarian federal system* merupakan sistem federal yang berdiri atas dasar satu nasionaliti tanpa memandang perbedaan etnis dan wilayah, dan (2) *ethnic federal system* merupakan sistem federal yang berdiri diatas keanekaragaman etnis mengedepankan toleransi didalamnya (Gunter, 2011).

## **F. Hipotesa**

Merujuk pada teori diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa:

1. Krisis yang dialami Saddam Hussein dalam pemerintahannya dan dunia internasional serta banyaknya korban jiwa dari pihak Kurdi Iraq akibat operasi Anfal Baghdad menggiring pada negosiasi damai.
2. Kehadiran Amerika Serikat dalam krisis yang dialami Baghdad menjadi celah bagi Kurdi Iraq dalam menguatkan posisinya di pemerintahan.

## **G. Metodologi Penelitian**

Untuk memahami perjuangan Kurdi Iraq dari era Sadam Hussein hingga sekarang, penulis menggunakan teknik metode *Kualitatif* dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data dari buku, jurnal, dan berita.

1. Penelitian ini bersifat deskriptif eksplanatif, yang menunjukkan:
  - a. Pemerintah Iraq dengan kebijakannya terhadap suku Kurdi di Iraq bagian Utara.
  - b. Jangkauan Penelitian dari kebijakan pemerintah Iraq sebelum era Sadam Hussein hingga lengsernya.
  - c. Sumber data terdiri dari buku, artikel jurnal, serta data-data internet yang dapat dipertanggung jawabkan.

### **2. Tehnik Penghimpunan Data**

Dalam upaya menyempurnakan penelitian ini penulis melakukan pengkajian data dari beberapa sumber baik buku, jurnal, maupun artikel lainnya yang membahas Kurdi dan gerakan separatisme, kemudian menyeleksi dan mengutipnya kedalam Thesis.

### **3. Teknik Analisa Data**

Penulis menggunakan analisa kualitatif dalam membaca permasalahan Kurdi Iraq yang digambarkan dengan fakta yang ada. Kemudian menarik sebuah kesimpulan setelah menghubungkan fakta

satu dengan yang lainnya. Maksud dari penelitian kualitatif ini supaya dapat memahami lebih dalam tentang manusia karena pemerintahan itu digerakkan oleh manusia. Dengan dasar “bagaimana” sebagai awal penelitian dan tidak hanya berpatokan pada “apa, dimana, dan kapan” menjadi fokus terhadap studi kasus ini.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mengetahui garis besar penulisan, penulis menyusun penelitiannya ke dalam beberapa bab yaitu :

Bab I. Pendahuluan berisi tentang latar belakang, tujuan penelitian, kontribusi riset, rumusan masalah, studi pustaka, kerangka teoritik, hipotesa, serta metodologi penelitian digunakan sebagai proposal atau langkah awal dari penelitian.

Bab II. Sejarah Peradaban Suku Kurdi di Timur Tengah, pada bab ini akan dijelaskan mengenai asal usul suku kurdi di wilayah lintas empat negara sejak 6000 SM hingga abad ke-7, kemudian pemaparan perlakuan pemerintah terhadap suku Kurdi di empat negara.

Bab III. Memaparkan dinamika perjuangan Kurdi Iraq dalam memperoleh status otonomi

Bab IV. Menganalisa perubahan tata kelola politik Kurdi Iraq di masa krisis Saddam Hussein hingga lengsernya (1970-2003)



Bab V. Kesimpulan berisi rangkuman atau ringkasan berdasarkan pada hasil yang didapatkan dari penelitian.